

Pusat Studi
Pendidikan & Kebijakan

NARASI THEORY OF CHANGE

PUSAT STUDI PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN (PSPK)

Teras Sebelas, Jl. Jeruk Purut No. 11
Jakarta Selatan, Indonesia, 12560

A. PENDAHULUAN

Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk mendorong kemajuan pendidikan nasional, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) perlu memahami kondisi dan perkembangan pendidikan nasional saat ini. Sejalan dengan komitmen ini, PSPK merasa perlu memiliki cara pandang yang sistematis untuk memahami kondisi pendidikan saat ini yang terangkum dalam sebuah *theory of change* (TOC) atau teori perubahan agar konsep perubahan tersebut terarah.

TOC menjelaskan teori tentang bagaimana perubahan terjadi atau dapat dilakukan. Sederhananya, ia adalah penjelasan untuk pertanyaan “bagaimana, atau apa yang dapat dilakukan untuk bergerak **dari titik ini ke titik sana.**” Penekanan diberikan pada kedua “ini” dan “sana” karena dalam prosesnya, menentukan di mana pendidikan kita *saat ini*, atau dengan kata lain *making sense of where we are* sama pentingnya dengan memutuskan ke mana atau ke titik mana yang akan dituju. Selain itu, yang dipetakan juga adalah **tantangan** atau **hambatan** yang berpotensi untuk mencegah tercapainya tujuan.

TOC banyak digunakan oleh institusi-institusi yang berorientasi pada perubahan atau berupaya untuk mengatasi masalah yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan perbaikan di satu atau dua aspek saja. TOC menjelaskan bagaimana aktivitas dapat dipahami untuk menghasilkan serangkaian *outcome* yang berkontribusi mencapai tujuan utama. Hal ini dapat dikembangkan untuk setiap tingkat intervensi seperti proyek, program, kebijakan, strategi, atau organisasi. Teori perubahan dapat juga merespon isu-isu yang muncul dan penentu keputusan yang dibuat oleh pemangku kebijakan (Rogers, 2014).

PSPK menyadari bahwa masalah-masalah pendidikan di Indonesia bukan masalah sederhana atau persoalan teknis yang dapat diselesaikan dengan satu atau dua solusi yang jelas. Satu masalah terkait kebijakan pendidikan seringkali tidak lepas dari kebijakan lain ataupun praktik lapangan yang sudah berlangsung sekian lama. Sebagai contoh, kebijakan untuk menurunkan porsi hasil UN dalam menentukan kelulusan siswa menjadi tidak efektif ketika hasil UN menjadi *high-stakes* atau syarat yang sangat penting untuk masuk ke perguruan tinggi.

Selain itu, PSPK juga mempunyai pemahaman bahwa meskipun setiap pendidik mempunyai tujuan akhir (*ultimate goal*) yang serupa, namun mereka tidak selalu mempunyai jawaban yang sama dari pertanyaan “apa yang harus dilakukan dan diubah untuk mencapai tujuan tersebut?” Artinya, organisasi yang terdiri dari pendidik-pendidik yang mempunyai latar belakang dan pengalaman berbeda-beda seperti PSPK membutuhkan satu kerangka pikir dan kerangka kerja yang selaras agar kekuatan kolektif yang dimiliki menjadi lebih terarah bergerak maju menuju tujuan bersama. Oleh karena itu pendekatan TOC digunakan untuk memvisualisasi tujuan, masalah, strategi, serta harapan yang ingin PSPK capai.

TOC dalam laporan ini memaparkan kerangka pemikiran dan strategi pendekatan yang digunakan PSPK dalam upaya memetakan kondisi dan perkembangan kebijakan pendidikan nasional saat ini, serta menentukan perannya dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan pendidikan di Indonesia menuju peningkatan akses, mutu, dan kesetaraan pendidikan di Indonesia.

Laporan ini diawali dengan proses pembuatan TOC, diikuti dengan ilustrasi TOC PSPK dan penjelasannya. Visualisasi membantu dalam memahami hubungan antara masalah dan upaya penyelesaiannya. Namun demikian, tanpa penjelasan yang lebih terperinci, maka TOC dapat menimbulkan salah paham, menggiring pembaca pada kesimpulan yang tidak relevan. Laporan ini diakhiri dengan rencana kerja PSPK hingga akhir tahun 2019.

Proses Penyusunan TOC

Pendiri PSPK pada tanggal 10 Agustus 2016 menyelenggarakan Rapat Kerja, diskusi sehari penuh untuk membangun TOC ini. Dalam tiga kelompok kecil, diskusi dilakukan untuk membahas apa yang menjadi masalah dalam konteks kebijakan pendidikan Indonesia, kondisi pendidikan seperti apa yang diharapkan, bagaimana mencapai kondisi tersebut serta peran apa yang dapat dimainkan oleh PSPK untuk mencapainya.

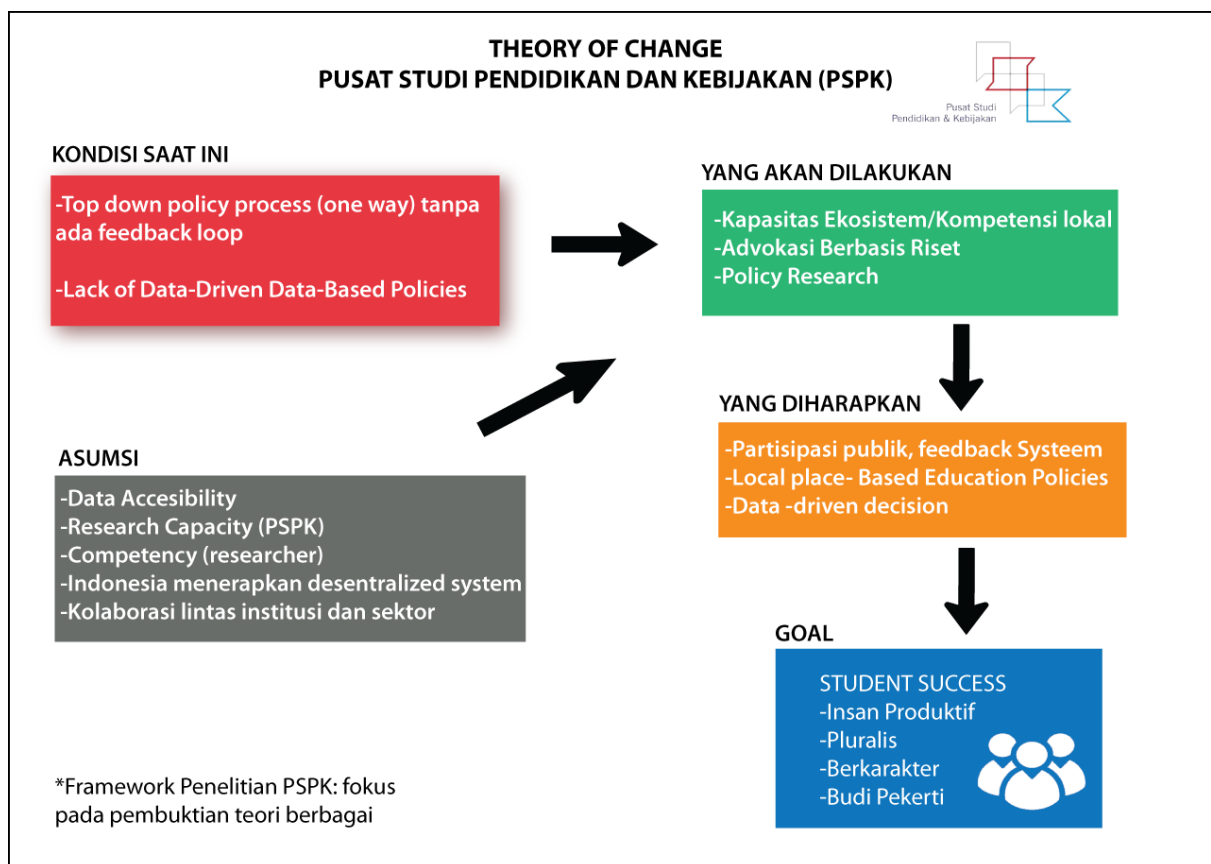
Selanjutnya diskusi pleno dilakukan untuk merumuskan satu TOC, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 1.

Dari pengalamannya merumuskan sebuah TOC, berikut adalah beberapa *lesson learned* dari proses pengembangan sebuah TOC itu sendiri:

- a. Keterbatasan waktu. Mendiskusikan untuk menentukan inti masalah pendidikan yang begitu luas dan kompleks dari berbagai sudut pandang penggerak/peneliti PSPK membutuhkan waktu yang panjang. Bukan saja latar belakang kepakaran yang berbeda, tetapi keterkaitan antara satu masalah dengan masalah pendidikan lainnya menyebabkan PSPK membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kesepakatan.
- b. Perlu panduan diskusi yang lebih terbatas dan hal ini berpotensi menyebabkan diskusi dalam kelompok tidak fokus pada kebijakan pendidikan yang sifatnya lebih makro.
- c. Pembatasan topik juga dapat dilakukan dengan misalnya menentukan tujuan yang diharapkan lalu setiap kelompok dapat fokus pada strategi untuk mencapainya.
- d. Walaupun demikian, keuntungan diskusi yang tidak dibatasi tersebut adalah munculnya ide-ide dan pemikiran organik yang orisinal. Contoh: pemetaan masalah yang tidak seragam

B. PEMAPARAN

Diagram di bawah ini mengilustrasikan *theory of change* PSPK.¹ Komponen penting dari TOC ini terdiri dari pemaparan pemahaman PSPK mengenai: 1) kondisi kebijakan pendidikan saat ini, 2) landasan asumsi pemikiran PSPK, 3) strategi perubahan yang diambil, 4) kondisi akhir atau *outcome* yang ingin diciptakan, serta 5) tujuan akhir yang ingin dicapai.



Gambar 1. Diagram TOC Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)

¹ Penting untuk dipahami bahwa TOC ini belum sepenuhnya dibangun berdasarkan data empiris sehingga masih dalam tataran hipotesis yang patut diuji.

Bagian 1: Perumusan Masalah Terkait Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Proses pembuatan kebijakan dan evaluasi kebijakan yang satu arah, yaitu top down. PSPK memandang masih banyaknya kebijakan dalam pendidikan yang dalam perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasinya yang belum mengedepankan kepentingan ataupun *feedback* dari berbagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan pendidikan, dan bersifat *top down*.

Contoh Kasus

Kebijakan pendidikan *top down* atau satu arah yang dinilai berimplikasi negatif antara lain adalah mengenai Ujian Nasional (UN) (Darmanityas & Subkhan, 2012). Ujian Nasional (UN) merupakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diimplementasikan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kemudian direvisi menjadi PP Nomor 32 Tahun 2013 dan revisi kedua PP Nomor 13 Tahun 2015 dan bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dampak negatif UN muncul ketika setiap siswa dan guru berlomba-lomba untuk memperoleh nilai tinggi agar memenuhi batas minimum kelulusan tanpa memperhatikan esensi atau substansi pendidikan untuk mencapai kompetensi yang utuh dan motivasi internal dalam belajar. Pada akhirnya banyak sekolah terindikasi melakukan kecurangan atau menghalal segala cara agar semua muridnya memperoleh predikat lulus dan diterima di sekolah pilihannya.

Proses pembuatan dan evaluasi kebijakan yang belum berdasarkan pada data empiris yang dapat dipertahankan validitasnya.

Seringkali kebijakan dikembangkan pemerintah tanpa informasi dan pengetahuan yang cukup, serta bukti-bukti pendukung terbaik atau data empiris yang valid dan dapat dipercaya, sementara setiap isu yang dihadapi dan perlu ditanggapi dengan pembuatan kebijakan bukan lah isu dengan solusi yang *clear-cut* atau gampang ditemukan².

Contoh Kasus

Usulan kebijakan baru untuk menerapkan *full day school* tampaknya tidak memiliki dukungan empiris, deskripsi yang jelas tentang tujuan yang dimaksudkan, mau pun pernyataan asumsi-asumsi dan kondisi yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan utama kebijakan yang akan diterapkan tersebut. Riset atau literatur mengenai *length of school day* atau jumlah jam sekolah juga belum konklusif. Mengacu pada data empiris dari negara-negara dengan indeks pendapatan yang tergolong rendah dan menengah, Bank Dunia dan UNESCO melaporkan

² Masalah adanya kesenjangan atau *gap* antara riset dan pembuatan kebijakan juga terjadi di berbagai konteks termasuk di negara-negara maju. Contohnya, kebijakan pendidikan *No Child Left Behind* di Amerika Serikat yang dicetus tahun 2002 pada hakikatnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dalam menghasilkan peningkatan hasil pembelajaran untuk seluruh peserta didik. Pada kenyataannya, kebijakan tersebut membuahkan banyak efek negatif kepada sekolah-sekolah tertentu, khususnya sekolah dengan mayoritas siswa dan siswi yang berlatarbelakang ekonomi menengah ke bawah, karena riset mengenai efektivitas sekolah yang sudah dilaksanakan di Amerika Serikat mau pun di Inggris sudah menemukan bahwa faktor latar belakang ekonomi siswa mempunyai dampak yang jauh lebih besar dari pada faktor sekolah dalam memprediksi atau menentukan hasil dan peningkatan hasil belajar siswa (Smith, 2005, p 519).

Mengacu pada data empiris dari negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, Bank Dunia dan UNESCO berkesimpulan bahwa memperpanjang hari sekolah tanpa meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas bukanlah kebijakan yang berdampak nyata terhadap hasil pembelajaran siswa (Bray, 2008). Sementara itu, ada satu penelitian yang menggunakan data pada sekolah di Ethiopia yang menemukan bahwa memperpanjang hari sekolah memiliki dampak positif pada peningkatan prestasi (Orkin, 2013). Indonesia sendiri belum merespon hasil-hasil penelitian seperti di atas dan menjadikannya pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan.

Data dan informasi mempunyai peran penting dalam membangun strategi komunikasi, mengidentifikasi masalah dan kesempatan, mendiagnosis permasalahan dan memahami proses, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien (Kaydos, 1994). Landasan pengetahuan berbasis riset juga mendukung perbaikan perencanaan dan pengawasan implementasi kebijakan, pengambilan keputusan dan tindak lanjut yang efektif. Tanpa landasan ini, kebijakan menjadi tidak efektif dan implementasi kebijakan tidak mampu mengantisipasi tidak terpenuhinya asumsi kondisi dan situasi yang lalu bisa membuahkan *policy intended outcomes* atau hasil yang diharapkan.

Contoh Kasus

Uji Kompetensi Guru (UKG) pada mulanya dijadikan dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, *entry point* penilaian kinerja guru dan alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Akan tetapi, Senior Vice President dari Pearson Assessment Centre Jim Tognolini mengungkapkan ketika sebuah tes digunakan sebagai alat penilaian, “guru malah akan fokus untuk lulus tes bukan fokus masalah mengajar” (ACDP, 2015) Ketika alat penilaian menjadi high stakes atau sangat penting, justru validitas penilaiannya cenderung menurun. Konteks pencanangan program UKG di saat otonomi guru masih sangat rendah, serta dukungan sistem di pemerintahan lokal maupun manajemen sekolah terbatas menunjukkan pemahaman tentang arah umum pengembangan profesi guru, dan tahapan rencana strategis yang diimplementasikan masih terbatas pada pencapaian target sempit jangka pendek: skor rata-rata hasil tes UKG.

Pada saat hasil penelitian atau data empiris sudah menjadi rujukan suatu kebijakan, maka argumen-argumen ini tidak dipaparkan secara eksplisit kepada publik sehingga akuntabilitas kebijakan tersebut menjadi rendah.

Terkadang, pemerintah belum menyampaikan *theory of change* serta argument yang kuat di balik sebuah kebijakan yang memaparkan tentang mengapa dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mencapai kondisi yang diharapkan.

Contoh Kasus

Setelah implementasi kebijakan pelibatan orang tua di sekolah melalui Komite Sekolah, sekolah masih tidak paham apa ekspektasinya sehingga orang tua hanya diharapkan keterlibatannya dalam bentuk kontribusi dana bukannya dalam pengambilan keputusan (Parker & Raihani, 2011; Vernez et al., 2012). Program mengantar anak di hari pertama sekolah di Indonesia, tidak dijelaskan dengan utuh indikator keberhasilan serta dampak antara maupun dampak jangka panjang yang diharapkan, sehingga tidak berhenti hanya sebagai satu kegiatan insidental yang dilakukan tanpa pemahaman dan sinkronisasi tujuan.

Publikasi landasan data empirikal dibalik penyusunan sebuah kebijakan berkontribusi mengarahkan dan merubah perilaku individu dan masyarakat, serta mengerahkan partisipasi publik serta memfasilitasi pelimpahan wewenang dalam sebuah komunitas pendidik serta pembuat kebijakan (Kaydos, 1994). Absennya *theory of change* dari suatu kebijakan juga dapat menyebabkan makin kuatnya budaya saling menyalahkan, ketidakpercayaan di dunia pendidikan, serta turunnya akuntabilitas pemerintah dan aktor lain di ekosistem dalam mengelola pendidikan. Publik menilai kebijakan baru tidak relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan tidak mendorong terlibat untuk makin berdaya dalam melakukan reformasi pendidikan.

PSPK menganggap beberapa hal di atas menjadi masalah kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut PSPK, kebijakan harus dibangun di atas landasan yang kuat dan landasan (alasan) ini harus dipublikasikan agar pendidik di akar rumput paham pentingnya mewujudkannya dengan baik serta mendorong memberikan umpan balik (*feedback*) terus-menerus.

Bagian 2: Kondisi yang Ingin Dicapai

Partisipasi publik sehingga proses pembuatan dan evaluasi kebijakan menjadi dua arah, *bottom up*

Pelibatan atau partisipasi publik telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 8 bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.” Publik, dalam hal ini pendidik dan juga institusi pemerhati pendidikan dapat memberikan *feedback* sekaligus berpartisipasi secara lebih sistematis di tingkat lokal maupun nasional, dalam memberikan kontribusi pada pembuatan, perubahan, dan evaluasi kebijakan. Sistematis maksudnya ada sistem yang dibangun dua arah, jadi bukan sekedar memberikan suara mereka lewat petisi dan ekspresi non formal atau bentuk manipulasi publik dan forum terbatas yang dikendalikan pengambil kebijakan

Data-driven policies - maksudnya kebijakan yang dibangun dengan landasan data empirik dan teori yang kuat, mengedepankan secara eksplisit landasan asumsi-asumsinya, serta dengan paparan tujuan yang jelas dan terukur

Semua pemangku kepentingan pendidikan memahami makna kebijakan dan mengetahui bagaimana mereka harus mengimplementasikannya sesuai konteks masing-masing. Publik dapat berpartisipasi dengan berdaya lebih produktif dalam memonitor dan mengevaluasi kebijakan tersebut

Kebijakan pendidikan yang berbasis daerah atau berorientasi pada kekuatan (resources) dan masalah yang ada di daerah

Dalam konteks negara Indonesia yang besar dan majemuk berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 34 bahwa “Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.” dan Ayat 38 “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian 3: *Ultimate Goals* yang Ingin Diwujudkan

Berdasarkan asumsi-asumsi yang diperhitungkan, maka apabila kondisi yang ingin dicapai (Bagian 2) tersebut dapat diwujudkan, Indonesia dapat lebih mudah melangkah menuju pendidikan yang dapat membantu generasi penerus bangsa untuk menjadi insan yang produktif sesuai UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Diharapkan peserta didik memiliki karakter kokoh dan bijak sehingga mampu hidup di alam demokrasi dan mampu menyikapi perbedaan secara positif, serta berbudi pekerti yang luhur. Hal ini dicapai dengan asumsi bahwa standar pendidikan nasional yang ditetapkan, kurikulum ppengajaran dan penilaian yang diterapkan, serta kandungan dari kebijakan-kebijakan lainnya mendorong ke arah tersebut.

Bagian 4: Strategi dan Langkah untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai

Peningkatan kapasitas dan kompetensi ekosistem pendidikan (sekolah, dinas pendidikan) alam memahami dan menerjemahkan kebijakan ke dalam implementasi di tingkat lokal

PSPK percaya bahwa sekalipun *local champion* teridentifikasi dan diberikan dukungan sebagai pihak yang dapat membantu proses peningkatan kapasitas sebuah kebijakan Pemerintah, ia tetap tidak dapat bergerak dan berjalan seorang diri. PSPK percaya bahwa penumbuhan komunitas/ekosistem kebijakan yang terdiri dari beragam *local champion* yang dapat bekerja sama merupakan sebuah hal krusial, sehingga investasi perlu dilakukan tidak hanya pada satu institusi, namun juga perlu membangun *trust* dan interaksi positif di antara beragam *local champions*, serta regenerasinya di masing-masing institusi.

Peningkatan kapasitas & kompetensi lokal ini menjadi penting menimbang bahwa keberhasilan sebuah kebijakan untuk membuahkan hasil yang diharapkan pun bergantung pada kinerja komunitas pendidik di komunitas dan daerah-daerah masing-masing. Selain untuk implementasi, kapasitas dan kompetensi untuk memberikan *feedback* yang efektif kepada pemerintah juga perlu ditingkatkan.

Contoh Kasus

Christopher Bjork (2002) menyimpulkan betapa penting nya pengembangan kapasitas guru-guru lokal, khususnya berdasarkan observasi nya terhadap transisi yang dialami sekolah-sekolah dan guru-guru Indonesia dari sistem pendidikan yang tersentralisasi penuh sebelum tahun 2000an, menjadi pendidikan yang di-desentralisasi di awal tahun 2000an. Dalam risetnya mengenai interpretasi dan implementasi kebijakan perubahan kurikulum muatan lokal oleh guru-guru di daerah, Bjork mengungkapkan bahwa meskipun politisi, pejabat Depdikbud, dan konsultan internasional bersemangat menjelaskan manfaat besar dari desentralisasi, tetapi mereka gagal memberikan dukungan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas guru di daerah. Guru-guru partisipan studi jarang yang merevisi perilaku mereka untuk mengimplementasikan maksud dari kebijakan kurikulum muatan lokal. Baik kurikulum maupun pedagogi tidak sejalan dengan visi Depdikbud. Tak satu pun dari sekolah yang diriset nya melakukan upaya bersama untuk membentuk kurikulum mulok agar sesuai dengan kebutuhan unik atau kepentingan mahasiswa (p. 199).

Berbagai institusi pemerintahan yang bergerak di bidang *international development* seperti CIDA (*Canadian International Development Agency*) menekankan bahwa peningkatan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat menambah kemampuan mereka dengan tujuan untuk: a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; dan b)

memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dan berkelanjutan (UNDP, 1998).

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan banyak terpusat pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Belum banyak penelitian-penelitian yang mengidentifikasi dan menganalisis inisiatif-inisiatif kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik pada tingkat Kabupaten atau Kota. Solusi-solusi lokal inilah yang perlu dikaji oleh PSPK sehingga adaptasi dan replikasi kebijakan serupa di daerah lain menjadi lebih *evidence-based* ketimbang berkat proses *trial and error* berdasarkan hubungan antar daerah semata.

Advokasi berbasis riset/penelitian

PSPK memilih strategi penyelenggaraan penelitian kebijakan pendidikan sebagai landasan advokasi kebijakan³. Advokasi suatu kebijakan pendidikan dapat dilakukan secara efektif apabila berlandaskan data dan referensi.

Definisi

Advocacy is a combination on individual and social action designed to gain plitical commitment, policy support, social acceptance, and systems support for particular goal or programme.

Advokasi merupakan berbagai kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan sistemik untuk tujuan atau program tertentu.

(World Health Organization, 1992, p. 2)

PSPK menimbang lima langkah berikut dalam upayanya melaksanakan advokasi kebijakan:

- a) *Identifikasi dan analisis masalah dan isu.* Data dan fakta mendukung perumusan masalah atau isu, pendekatan pembuatan keputusan yang sesuai, serta menentukan solusi dan tujuan yang realistis.
- b) *Identifikasi dan analisis kelompok sasaran.* Sasaran advokasi ditujukan kepada para pembuat keputusan (*decision maker*) atau penentu kebijakan (*policy maker*), dengan tujuan agar pembuat keputusan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan instruksi yang menguntungkan semua pihak.
- c) *Pengumpulan dan diseminasi informasi yang akurat, tepat, dan user-friendly.* Siapkan bahan informasi akurat, Para pembuat kebijakan akan termotivasi dalam mengambil keputusan jika mengetahui secara rinci permasalahan tertentu dengan

³ Kebijakan pendidikan yang berbasis penelitian adalah produk yang diminati oleh politikus. Posisi pembuat kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, adalah posisi politis. Oleh karena itu, apabila kebijakan pendidikan yang berbasis penelitian tidak dianggap penting untuk politikus, maka ia menjadi tidak relevan untuk dikuatkan. Strategi advokasi berkait dengan pentingnya sektor pendidikan dalam mendukung kekuatan dan proses demokrasi negara juga menjadi sangat penting untuk terus dipromosikan.

- informasi yang tepat dan data pendukung yang memadai serta mudah dimengerti.
- d) *Rencana teknik atau acara kegiatan operasional.* beberapa teknik dan kegiatan operasional dapat meliputi konsultasi, lobi, pendekatan formal dan informal terhadap para pembuat keputusan, negosiasi, diskusi publik, petisi, pembuatan opini, dan seminar-seminar.
 - e) *Evaluasi dan monitoring advokasi secara berkelanjutan.*

Dalam hal ini, mengingat kompleksitas masalah pendidikan di Indonesia, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga dari beragam sektor menjadi sangat esensial. Langkah-langkah di atas dilandasi beberapa prinsip yang dianut oleh PSPK, yakni: 1) melibatkan para pemimpin/pemangku kebijakan, 2) bekerja sama dengan rekan media/pers, 3) membangun kemitraan, 4) mobilisasi massa atau pelibatan publik, dan 5) membangun kapasitas (Assifi, 2005).

Bagian 5: Asumsi-asumsi

Pada bagian ini, PSPK merumuskan dan merangkum asumsi-asumsi yang dapat menjelaskan dalam kondisi apa Bagian 1, 2, 3, dan 4 dari Gambar 1 dapat terhubung, atau bagaimana kondisi yang ingin dicapai dapat diwujudkan.

Asumsi 1: Tersedianya data

Membangun kondisi di mana kebijakan dibuat dan dievaluasi berdasarkan data, maka asumsi yang digunakan adalah tersedianya data.

Aktifitas identifikasi sumber-sumber data sudah dan akan terus dilaksanakan. Sumber-sumber data yang terdata antara lain termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan⁴ yang sudah mulai mempublikasikan berbagai macam data, dan juga repositori data dari institusi-institusi lain nya⁵.

Asumsi 2: Kompetensi Peneliti

PSPK mempunyai posisi strategis dan peneliti-peneliti di PSPK mempunyai kompetensi untuk menghasilkan penelitian yang relevan. PSPK terdiri dari para peneliti beragam kompetensi seperti ahli kebijakan pendidikan, ahli literasi dan numerasi, pakar psikologi, pakar kebijakan publik dan lain-lain.

Asumsi 3: Desentralisasi pendidikan yang terus diterapkan

Strategi dan kebutuhan akan meningkatnya kapasitas daerah untuk membuat, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan menjadi tidak relevan apabila Indonesia kembali menerapkan sistem pendidikan yang sentralistik. Asumsi kunci PSPK adalah

⁴ Beberapa sumber data dari Kemdikbud dapat diakses antara lain dari web site seperti “Sekolah Kita” (sekolah.data.kemdikbud.go.id), “Publikasi Statistik” (publikasi.data.kemdikbud.go.id), dan serta juga “Neraca Pendidikan Daerah” (npd.data.kemdikbud.go.id) yang dapat diakses secara umum.

⁵ Seperti Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) dan Mediatrac.

bahwa penyelenggaraan pendidikan bermutu merupakan tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Basis Legal Desentralisasi

Desentralisasi atau otonomi bidang pendidikan diimplementasikan pemerintah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah kemudian direvisi sampai menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 14 disebutkan “(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial.” Otonomi pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tercantum pada Bagian Ketiga: Hak dan Kewajiban Masyarakat, Pasal 8. Disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.” Kemudian Pasal 9 menerangkan bahwa “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”

Indikator dan Pengukuran

Demi akuntabilitas, *theory of change* perlu diterjemahkan ke dalam sebuah pengukuran/indikator yang jelas, sehingga keberhasilan (atau ketidakberhasilan) strategi dan intervensi yang dilakukan oleh PSPK dapat dianalisis dan dipelajari secara transparan. Secara umum dan sederhana, tabel berikut menunjukkan indikator-indikator tersebut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas ekosistem pendidikan dalam memahami dan menterjemahkan kebijakan ke dalam implementasi di tingkat lokal.

Komponen ToC	Indikator
Input <ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan staf periset daerah yang sesuai dengan kebutuhan area peningkatan kapasitas - Perekrutan staf pendamping daerah - Penyusunan proposal awal 	<ul style="list-style-type: none"> - Terekrutnya jumlah staf - Tersusunnya proposal
Proses Strategi/output <ul style="list-style-type: none"> - Assesment awal kapasitas Pemda dalam sebuah isu spesifik kebijakan pendidikan - Identifikasi <i>local champion</i> dalam isu kebijakan spesifik, dari multi-stakeholder - Penyusunan strategi dan penetapan milestone bersama antara PSPK 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan assesment awal pemetaan masalah dan isu spesifik kebijakan pendidikan - Adanya profil <i>potential local champion</i> beserta trajektori karir ybs dalam kebijakan pendidikan yang dimaksud, dari masing-masing stakeholder - Dokumen Rencana Strategis Pemda kemitraan antara PSPK dengan Pemda

dengan Pemda dalam isu spesifik.	
Outcome: <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya <i>milestone</i> capaian daerah sesuai <i>strategic plan</i> - Adanya regenerasi <i>local champion</i> - Berlanjutnya praktik baik dua tahun pasca berakhirnya <i>Strategic Plan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator <i>milestone</i> tercapai - Berjalannya kebijakan 2-3 tahun pasca berakhirnya <i>Strategic Plan</i>
Goal: <ul style="list-style-type: none"> - Kepuasan pemangku kepentingan terkait (Kemdikbud, masyarakat, Bupati, dll) terhadap spesifik kebijakan yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data kualitatif dan kuantitatif kepuasan kinerja dari para pemangku kepentingan terkait - Indeks Pembangunan Manusia Meningkat - Standar Pendidikan Nasional Meningkat

Strategi 2: Penelitian dalam bidang kebijakan pendidikan yang dapat memonitor dan mengevaluasi kebijakan pendidikan tertentu di Pemerintah Daerah

Komponen ToC	Indikator
Input <ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan staf periset daerah yang sesuai - Perekrutan staf pendamping daerah, dengan pengetahuan lokal - Penyusunan proposal awal 	<ul style="list-style-type: none"> - Terekrutnya jumlah staf - Tersusunnya proposal
Proses Strategi/Output Dalam sebuah isu kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh PSPK dengan pertimbangan strategis dan <i>originality</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi dampak sebuah kebijakan pendidikan oleh Pemda - Menganalisa tingkat <i>replicability</i> atau <i>scalability</i> sebuah kebijakan untuk Pemda lain - Mengidentifikasi <i>bottleneck</i> dan <i>role</i> Pemerintah Pusat sebagai <i>enabler</i> - Diseminasi penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi laporan riset evaluasi dampak, analisa potensi replikasi, dan pengembangan peran Pemerintah Pusat - Publikasi aporan analisa <i>replicability dan scalability</i> - Kehadiran Pemda-pemda dalam diseminasi
Outcome <ul style="list-style-type: none"> - <i>Citation</i> artikel media/penelitian yang menggunakan hasil penelitian - Ketertarikan (<i>pitching</i>) dari Pemda-Pemda lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah <i>citation</i> artikel media/penelitian - Jumlah presentasi/pemaparan bagi Pemda dan DPR/DPRD yang tertarik untuk mempelajari temuan yang

	dihasilkan
Goal: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemda yang dihasilkan berdasarkan penelitian - Kebijakan Pemerintah Pusat yang dihasilkan berdasarkan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda yang dihasilkan - Permen atau PP yang dihasilkan

Strategi 3: Advokasi berbasis penelitian, sebagai kelanjutan langkah dari strategi 2

Komponen ToC	Indikator
Input <ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan staf periset daerah - Perekrutan staf pendamping/advokat daerah - Penyusunan proposal awal 	<ul style="list-style-type: none"> - Terekrutnya jumlah staf - Tersusunnya proposal
Proses Strategi/output <ul style="list-style-type: none"> - Political dan <i>issue-mapping</i> - 3 Sosialisasi dan diseminasi bagi pemangku kepentingan utama untuk membangun kesepemahaman mengenai issue - Pelatihan bagi jurnalis-jurnalis lokal dalam mengedukasi issue - 2 <i>Issue management</i> dan <i>coalition building</i> - Pendampingan dalam <i>legal drafting</i> penyusunan regulasi yang mengadopsi praktik-praktik baik kebijakan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen mapping politik dan pemangku kepentingan utama - Mapping potensi kemitraan - Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi dengan pemangku kepentingan lokal - Jumlah kegiatan media - Tersusunnya regulasi (Perda atau Permen) mengenai sebuah isu.
Outcome <ul style="list-style-type: none"> - Disahkannya regulasi dengan naskah akademik yang menggunakan penelitian PSPK sebagai dasar/landasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah <i>policy brief</i>
Goal: <ul style="list-style-type: none"> - Efektifnya Regulasi yang telah ditetapkan - Adanya monitoring yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan terhadap berjalannya regulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi berjalan (berdasarkan riset) - Terlibatnya pemangku kepentingan terkait dalam memonitor implementasi kebijakan (berdasarkan riset)

C. KESIMPULAN

Berbeda dengan *logic framework (logframe)*, TOC lebih fokus pada hubungan (*relationship*) antar kondisi. Sebaliknya, *logframe* lebih mengutamakan langkah-langkah ketercapaian tujuan, termasuk langkah yang dipilih oleh suatu organisasi. TOC tidak berorientasi pada hal yang sangat spesifik, sementara komponen dalam *logframe* harus disusun secara spesifik sehingga dapat terukur. Dengan demikian, *logframe* suatu kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh PSPK merupakan turunan (*derivative*) dari TOC-nya. Dengan kata lain, TOC ini disusun sebagai langkah awal PSPK untuk menerapkan strateginya dalam mencapai kondisi pendidikan Indonesia yang diharapkan.

REFERENSI

- ACDP. (2015). Hasil tes tidak bisa jadi patokan kualitas guru. *ACDP Education News Monitoring Service*. Retrieved from <https://acdpendonesia.wordpress.com/2015/08/10/>
- Assafi, N. (2005). *Key approaches of advocacy [PowerPoint]*. Retrieved from <http://www.pitt.edu/~super7/18011-19001/18371.ppt>
- Bjork, C. (2003). Local responses to decentralization policy in Indonesia. *Comparative Education Review*, 47(2), 184-216.
- Bray, M. (2008). *Double-shift schooling: Design and operation for cost-effectiveness*. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Darmaningtyas & Subkhan, E. (2012). *Manipulasi kebijakan pendidikan*. Yogyakarta: Resist Books.
- Kaydos, W. (1994). Why measurement is important to quality improvement. *Quality Progress*, 27(5), 6
- Orkin, K. (2013). The effect of lengthening the school day on children's achievement in Ethiopia. *Young Lives: An International Study on Childhood Poverty Work. Pap, 119*. Retrieved from http://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YLWP119_Orkin_Lengthening%20the%20school%20day.pdf
- Parker, Lyn, and R. Raihani. Democratizing Indonesia through education? Community participation in Islamic schooling. *Educational Management Administration & Leadership* 39.6 (2011): 712-732.
- Rogers, P. (2014). *Theory of Change. Methodological Briefs: Impact Evaluation No. 2*: UNICEF Office of Research. Florence
- Smith, E. (2005). Raising standards in American schools: the case of No Child Left Behind. *Journal of Education Policy*, 20(4), 507-524. Chicago
- UNDP, (1998). Capacity assessment and development in a systems and strategic management context. *Technical Advisory Paper No. 3*. New York.
- Vernez, G., Karam, R., & Marshall, J. H. (2012). *Implementation of school-based Mmanagement in indonesia [Monograph]*. Santa Monica, CA: RAND Corporation
- World Health Organization (1992) *Advocacy strategies for health and development: Development communication in action*. WHO, Geneva.